BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Administrasi Keuangan merupakan kegiatan didalam mengelola uang secara tertib, berdaya guna serta berhasil guna untuk mencapai tujuan sesuai dengan tujuan organisasi. Administrasi keuangan merupakan proses yang menyangkut tentang pengelolaan uang organisasi dan melaksanakan fungsi-fungsi penganggaran, penyediaan, pembukuan dan pertanggungjawaban atas pekerjaan dalam rangka kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi harus di tunjang dengan administrasi keuangan daerah yang efisien, efektif akuntabilitas, serta bisa dipertanggung jawabkan. Setiap belanja daerah harus dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Harapan agar pengelola keuangan tidak terjadi penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Untuk menunjang harapan tersebut telah ditetapkan beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Keuangan Negara khususnya seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima adalah satu dari sejumlah kegiatan dari pengelolaan keuangan yang adalah serangkaian aktivitas yang dilangsungkan secara sistematis dibidang keuangan sesuai dengan bermacam prinsip, standar juga tata cara khusus untuk memberi informasi actual dibidang keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Laporan Pertanggungjawaban termasuk kedalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian disamping penulis tertarik untuk mengambil tema tentang Laporan Pertanggungjawaban,

Pemberlakuan Sistem Aplikasi Satker (SAS) pada instansi pemerintah pengelola dana APBN ialah kewajiban untuk user maupun seringkali dinamakan *mandatory system*. Kehadiran aplikasi tersebut

diharapkan bisa memudahkan tugas pengelola keuangan terutama bendahara penerimaan didalam menyusun laporan pertanggung jawaban. Meskipun demikian, beragam masalah timbul terkait pada implementasi sistem yang terbilang baru. Nyaris tiap tahun sistem tersebut mengalami perubahan melalui proses berulang kali proses update pada tahun pertama pemberlakuannya. Hal tersebut memunculkan keresahan juga kebingungan pada tingkat pengguna dikarenakan belum mahir dalam alur kerja suatu sistem tetapi sistem itu sudah mengalami perubahan lagi. Untuk sebagian pengguna yang dapat mengikuti dinilai amat positif, namun untuk sebagian lainnya dirasa amat menyulitkan serta menganggu kenyamanan sehingga mengakibatkan timbulnya resistensi maupun penerimaan terhadap teknologi baru yang hilang.

Kehadiran SAS tidak serta merta bisa mengubah pola piker pengguna yang sudah terpola mengenai rumitnya sistem baru yang wajib mereka pelajari serta berlakukan didalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai petugas pengelola keuangan. Meskipun tujuan dari implementasi sistem termasuk tahapan *update* ialah guna mendongkrak efektivitas kerja serta mempermudah pengguna tetapi kenyataan di lapangan berkata sebaliknya. Sikap mental dari pengguna terutama bendahara penerimaan yang sudah apriori pada kehadiran sistem.

Dalam kegiatan di Badan Diklat PKN BPK RI penulis melakukan aktivitasnya di Sub bagian Keuangan khususnya pada bendahara penerima yang bertugas harus mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang ada didalam tanggung jawabnya. Menurut Ibu Ella bendahara penerima mempertanggungjawabkannya secara administrative sesuai dengan pengelolaan uang yang adalah tanggungjawabnya melalui penyampaian laporan pertanggung jawaban penerimaan pada pemakai Anggaran/Kuasa pengguna anggaran lewat PPK-SKPD selambat lambatnya tanggal 10 bulan selanjutnya. Laporan pertanggungjawaban diatas dilampiri Buku Rekapitulasi penerimaan bulanan, Buku Kas Umum, bukti penerimaan lain yang sah. Selain itu, jika SKPD memiliki bendahara penerima pembantu sehingga bendahara penerima akan mendapatkan SPJ Penerimaan

pembantu. SPJ itu selanjutnya diverifikasi, dievaluasi, dianalisa agar bisa menjadi bahan pertanggungjawaban bendahara penerima.

Sehubungan dengan hal tersebut maka menarik kiranya masalah laporan pertanggungjawaban ini dikaji lebih jauh dan dijadikan topik untuk penulisan Tugas Akhir. Menarik masalah ini, karena dalam pengelolaan keuangan khusus yang menjadi penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerima itu sendiri merupakan dokumen yang berisikan informasi mengenai rekapitulasi penerimaan, penyetoran, serta saldo kas yang terdapat pada bendahara. Oleh karena itu, pengkajian terhadap masalah laporan pertanggungjawaban ini akan penulis fokuskan pada masalah proses penyusunannya. Sesuai dengan hal itu penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih dalam dan mengangkat topik ini didalam laporan tugas akhir dengan judul "**Tinjauan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara penerimaan Menggunakan Sistem Aplikasi Satker (SAS) Pada Badan Diklat PKN BPK RI".**

I.2 Tujuan

Berikut tujuan dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu :

a. Untuk mengetahui cara penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara penerimaan menggunakan Sistem Aplikasi Satker (SAS) Pada Badan Diklat PKN BPK RI.
b. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang terkait didalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pada Badan Diklat PKN BPK RI.

I.3 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan laporan tugas akhir yang berjudul Tinjauan atas Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara penerimaan Menggunakan Sistem Aplikasi Satker (SAS) Pada Badan Diklat PKN BPK RI antara lain:

1. Secara Teoritis

   Laporan ini di harapkan memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu, wawasan serta informasi mengenai Proses

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan menggunakan Sistem Aplikasi Satker (SAS) Pada Badan Diklat PKN BPK RI yang mungkin dapat dijadikan referensi atau acuan berikutnya bagi pembaca mengenai proses tersebut.

2. Secara Praktis

   Laporan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan yang luas mengenai Proses Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan menggunakan SAS Pada Badan Diklat PKN BPK RI. Membandingkan teori yang didapatkan selama masa perkuliahan dengan realita yang sesungguhnya terjadi pada dunia instansi.